

**SEPARATISME DALAM KONTEKS GLOBAL
(STUDI TENTANG EKSISTENSI REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)
SEBAGAI GERAKAN SEPARATIS INDONESIA)**

Oleh: Anna Yulia Hartati¹

Abstraksi

Kenyataan sejarah tidak dapat dipungkiri, bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) pernah "hidup" di Ambon (Maluku tengah pada umumnya), walaupun tidak lama. Bagi para aktivis RMS, kenyataan sejarah juga membuktikan bahwa RMS bukanlah gerakan separatis" seperti yang dipikirkan banyak orang saat ini. RMS menurut mereka, didirikan, "sebelum" negara Kesatuan RI, menjadi seperti yang sekarang ini, dengan wilayah kesatuan dari Sabang sampai ke Merauke. Konflik-konflik di Maluku disinyalir juga ada keterlibatan RMS. Eksistensi gerakan RMS makin menguat. Didalam negeri hari kelahiran RMS selalu diperingati setiap tanggal 25 April, sedangkan dalam konteks global mereka memanfaatkan kemajuan teknologi media, untuk memperoleh dukungan di dunia internasional. Tokoh-tokoh RMS juga masih ada di Belanda dan terus mendukung perjuangan RMS di Maluku. Gerakan ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah RI, karena menyangkut keutuhan wilayah dan keberadaan NKRI.

Kata kunci: Separatisme, Konflik Maluku, Tokoh RMS

A. PENDAHULUAN

Persoalan separatis di Indonesia masih menjadi agenda besar pemerintah RI, untuk dicarikan solusi yang tepat ditengah konflik-konflik yang muncul seiring keberadaan gerakan separatis tersebut. Ada beberapa gerakan separatis yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain: GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM(Organisasi Papua Merdeka), RMS(Republik Maluku Selatan) dan di beberapa wilayah yang mengarah ke tindakan separatis seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Timor Timur berusaha untuk melepaskan diri dari NKRI. Berbagai kontroversi muncul seputar lepasnya wilayah Timor Timur dari NKRI. Apapun alasannya keberpihakan pada rakyat menjadi kunci utamanya.

Posisi dan status kelompok RMS tidaklah begitu mengkhawatirkan, namun gerakan-gerakan RMS saat ini tidak lagi mengedepankan kepada konfrontasi secara langsung dan melakukan pemberontakan, namun gerakan-gerakan RMS telah beralih kepada gerakan diplomasi dan demonstrasi untuk menarik simpati dunia internasional khususnya di luar negeri. Tokoh-tokoh RMS di Belanda seperti John Wattilete, Wim Sopacua serta yang lainnya akan tetap memperjuangkan kepentingan RMS khususnya di Belanda. Tokoh-tokoh dan Aktivis-aktivis RMS yang ada di negeri Belanda hampir

¹ Staf pengajar Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Email: anna_uwh@yahoo.co.id

seluruhnya merupakan warga negara Belanda. Sejak tahun 1965-an, tokoh-tokoh dan pejuang RMS banyak yang melarikan diri keluar negeri, khususnya ke negeri Belanda.

Melihat kasus RMS, eksistensinya masih ada bahkan makin menguat. Hal ini ditunjukkan dengan peringatan setiap tahun kelahiran RMS pada tanggal 25 April oleh Front Kedaulatan Maluku (FKM). Berbagai aksi yang dilakukan RMS pun dalam rangka untuk menunjukkan eksistensinya. Seperti pada Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.² Ada pengamat mengatakan bahwa Maluku Selatan berontak karena kuatnya hubungan elite di wilayah itu dengan Belanda di masa kolonial

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi RMS sebagai gerakan separatis Indonesia dalam konteks global serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah separatis RMS.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah eksistensi RMS sebagai separatis Indonesia dalam konteks global?
- b. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah RMS?

C. TINJAUAN TEORITIS

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa)³ Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius).

Menurut Dewi Fortuna Anwar, bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. RMS lahir ketika kondisi politik pasca KMB yang menghasilkan RIS belum stabil. Dalam bentuk federasi atau serikat yang longgar, negara bagian bergaris etnis yang didukung oleh Belanda cenderung menimbulkan kecurigaan pemerintah RI. Ada kecenderungan dari beberapa negara bagian memperoleh kemerdekaannya.

Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan⁴ Separatisme juga bisa diartikan suatu kelompok nasionalis yang mencoba untuk melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru. Kebanggaan kelompok separatisme adalah etnis,

² Suara Merdeka, 14 Mei 2002.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1998. Hal. 210

⁴ Dewi Fortuna Anwar dkk, *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2004. Hal. 213

dan bisa juga perang saudara.⁵Separatisme berhubungan dengan konsep nasionalisme, dimana bangsa menjadi rujukannya.⁶

Adapun faktor penyebab separatisme adalah sebagai berikut:⁷

- a. faktor ideologis dapat muncul sejalan dengan hadirnya pemahaman baru tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan manusia mendorong orang untuk mencari ideologi alternatif.
- b. faktor kezaliman politik. Pemerintahan yang totaliter tidak memberi ruang yang cukup bagi warga negaranya untuk mengekspresikan tuntutan dan kepentingan politiknya. Kalaupun ada ritual pemilihan umum, ia cenderung dijadikan alat untuk melanggengkan dan membenarkan rezim yang berkuasa. Rezim politik yang seperti ini sering menekan aspirasi dan keinginan sekelompok masyarakat, tetapi kadang juga mengeksploitasi sebagian besar masyarakat. Tekanan politik yang sedemikian berat itu, pada tingkatan tertentu, akan memicu lahirnya gerakan-gerakan separatisme.
- c. faktor ekonomi. Pada awal masa reformasi, beberapa daerah kaya penghasil minyak dan hasil hutan menuntut sikap adil pemerintah. Kepentingan ekonomi masyarakat lokal bukan satu-satunya motif yang bisa mendorong separatisme. Kepentingan ekonomi negara asing juga memainkan peranan penting dalam gerakan separatisme di banyak negara. Dari sejarah perpolitikan dunia, kita mengetahui di mana ada peran AS dan Eropa (terutama Inggris dan Prancis), kepentingan ekonomi selalu mengemuka. Kepentingan ekonomi ini juga menjadi faktor penting masuknya intervensi atau peran asing.
- d. intervensi asing. Mantan direktur intelejen BAKIN, Dr. AC Manullang, dalam wawancara dengan Koran Tempo, mengatakan bahwa ada keterlibatan dinas intelejen AS, CIA, dalam berbagai kerusuhan seperti di Aceh, Sampit, Pangkalan Bun, Ambon, Irian, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah agar Indonesia chaos. Untuk kasus Ambon disinyalir ada keterlibatan Belanda.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸

Dalam metode ini penulis berusaha mendeskripsikan eksistensi RMS sebagai gerakan separatis di Indonesia dan dalam konteks global serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam mengatasi masalah RMS.

⁵ *politik.kompasiana.com/2011/04/30/penyebab-perang*, diakses Juli 2010

⁶ Wolter S Jones, *Logika HI II*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 182

⁷ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2064647-faktor-faktor-pemicu-munculnya-separatisme/#ixzz1Lrp8B95f>, diakses juli 2010

⁸ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia (Jakarta:1988), hal.63

E. PEMBAHASAN

E.1. Sejarah RMS

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda ^[1].

Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang diantaranya adalah Chr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu. Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.A Kawilarang.

Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja. RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan.

Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian *Algemeen Dagblad* yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keinginan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh ⁹

Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilette adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda. Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

E.2.RMS dan Konflik Maluku

⁹ "http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan"

Kerusuhan di Maluku mencapai puncak pada tahun 1999 dan pada awal 2002 kondisi juga mencekam, dengan terbakarnya kantor gubernur Maluku, serangan terhadap penduduk Soya, kemudian disusul dengan pengibaran bendera RMS.

Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.¹⁰

E.3. RMS dalam Konteks Global

Dalam konteks global gerakan ini mulai mencari dukungan masyarakat internasional melalui jaringan internasional di internet. Tema yang selalu diusung oleh kelompok RMS adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi kelompok yang selalunya tertindas dan penentuan nasib sendiri. Kelompok RMS saat ini diibaratkan sebagai kelompok separatis yang posisi dan kedudukannya tidak lagi mendapat dukungan oleh dunia internasional, namun secara idiologi, RMS masih terus hidup dan berkembang khususnya di negeri Belanda.

E.3.1. Status dan Keberadaan RMS

Untuk mencapai cita-citanya, RMS membutuhkan pengakuan internasional dan teritorial. Hal terakhir inilah yang tengah dengan keras diupayakan. Kegagalan Negara Setiap pemberontakan tentu memiliki alasannya sendiri, yang antara lain berpangkal pada ketidakadilan perlakuan pusat terhadap daerah.

Dalam hukum internasional Belligerent (pemberontak)¹¹ atau pihak yang bersengketa merupakan salah satu Subjek Hukum Internasional. Seperti diketahui ada beberapa Subjek Hukum Internasional yang dikenal di antaranya adalah negara, organisasi internasional baik bilateral dan multilateral, Vatikan, Palang Merah Internasional, penjahat perang atau genocide serta individu. Oleh sebab itu, Subjek Hukum Internasional diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional.

Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di antaranya meliputi; Pertama, kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim. Kedua, kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian. Ketiga, kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalan.

¹⁰ "[Asgub Diduga Terlibat Kasus RMS, Polisi Masih Selidiki](#)", [DetikCom](#), diakses Juli 2010

¹¹ Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 38

RMS secara sepihak telah memproklamkan kemerdekaannya pada 25 April 1950, kurang dari 1 tahun semenjak disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, pada tanggal 27 Desember 1949. RMS menyatakan merdeka dan keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Hasil kesepakatan KMB memutuskan bahwa Indonesia menganut sistem serikat. Status RMS hingga saat ini tidaklah dapat dikatakan sebagai pemberontak (*belligerent*) atau pihak yang bersengketa.

Untuk dapat dikatakan sebagai pemberontak (*belligerent*) atau pihak yang bersengketa dan diakui sebagai salah satu Subyek Hukum Internasional, jika memenuhi kategori seperti; (1).kelompok tersebut berkuasa di sebuah wilayah di dalam negara tempat mereka melakukan pemberontakan. (2). kelompok tersebut memproklamkan kemerdekaan, bila tujuan akhirnya adalah pemisahan diri. (3).kelompok tersebut memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. (4). kelompok tersebut memulai konflik dengan pihak pemerintah yang berkuasa dan yang paling penting adalah pihak pemerintah mengakui status mereka sebagai pemberontak (*belligerent*).

Memandang hal yang demikian, status kelompok RMS tidak serta- merta dapat dikategorikan sebagai *belligerent*, yang perlu diakomodasi oleh pemerintah Indonesia. Status RMS tidak bisa disamakan dengan kelompok separatis Fretilin di Timor Leste misalnya, yang sudah kita ketahui pada akhirnya Timor Leste menjadi negara berdaulat terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan RMS bisa dikatakan antara ada dan tiada. Dalam realitanya gerakan ini kalah gaungnya dengan GAM dan OPM. Tetapi keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Dari data yang ada, terdapat beberapa dokumen yang menyatakan bahwa gerakan RMS masih aktif baik didalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Eksekutif "Missi Rakyat Maluku", D Sahalessy dalam suratnya kepada BJ Habibie dan Jenderal Wiranto, sekitar tahun 1988:" Bahwa perjuangan kemerdekaan Maluku lewat proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) itu tidak akan merugikan hak hidup bangsa manapun juga, termasuk pemerintah Belanda dan pemerintah RI..."

KUTIPAN pernyataan di atas, merupakan materi surat resmi yang dikirim dari kantor 'pemerintahan pengasingan RMS' di De Klenckestraat 42, 9404 KW Assen-The Netherlands (telp 31592 352141), tertanggal 15 November 1998. Tembusan surat tersebut dikirimkan pula kepada Komnas HAM di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag, EIR-International di New York dan sejumlah instansi internasional terkait serta dewan mahasiswa di Indonesia.¹²

Bukti lainnya, Parlemen Belanda bahkan secara transparan memperlihatkan support-nya, terutama Partai Buruh dan Fraksi Kristen Demokrat. Pers Belanda bahkan menyebut RMS sebagai pemerintahan dalam pengasingan (*in exile*).¹³ Tulisannya berbunyi, "Pemerintah Maluku Selatan (AMS) yang berbasis di Belanda kini tengah mematangkan persiapan untuk mengambil alih kekuasaan di Maluku Selatan."Kepada harian itu, Tutuhaturunewa mengatakan bahwa beberapa kader RMS dari Belanda saat ini sedang berada di Maluku untuk melakukan misi memperkuat semangat di kalangan penduduk dan menyempurnakan persiapan kemerdekaan. RMS di Belanda ikut bergabung ke dalam UNPO (*Unnational People Organization*) Guna memperluas pengaruh jaringannya, gerakan

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen_pemberontakan_RMS_di_Maluku, diakses Juni 2010

¹³ Harian *Haagsche Courant* (16/12/98)

separatis ini mulai merasuk ke dalam jaringan internet. Paling tidak ada dua homepage yang diketahui sebagai alat propaganda RMS. Dalam DLM (*Djangan Lupa Maluku*) misalnya, dapat dijumpai naskah proklamasi RMS tanggal 25 April 1950 yang ditandatangani JH Manuhutu dan A Wairisal.¹⁴

E.3.2. RMS Di Belanda

Kemerdekaan RMS yang di Proklamirkan oleh sebagian besar rakyat Maluku, pada tanggal 24 April 1950 di kota Ambon, ditentang oleh Pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno - Hatta, maka Pemerintah RI meng-ultimatum semua para aktifis RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah RI, sehingga semua aktifis RMS itu ditangkapi oleh Pasukan2 Militer yang dikirim dari Pulau Jawa.

Karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh militer Pemerintah RI, maka para pimpinan teras RMS tersebut, ber-inisiatif untuk menghindar sementara ke Negeri Belanda, kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan adanya kesediaan bantuan dari Pemerintah Belanda untuk mengangkut sebagian besar rakyat Maluku dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda, maka sebagian besar rakyat di Maluku yang beragama kristen, memilih dengan kehendaknya sendiri untuk pindah ke Negeri Belanda. Pada waktu itu, Ada lebih dari 15.000 rakyat Maluku yang memilih pindah ke negeri Belanda.

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tdkd bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakan bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Selama tahun 70-an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977

¹⁴ *ibid*

menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api. Sejak tahun 80an hingga sekarang aktivitas teror seperti itu tidak pernah dilakukan lagi.

E.4. Upaya Pemerintah RI

Pemerintah harus berhati-hati dalam menyelesaikan masalah dengan separatis. Seperti yang sudah dilakukan terhadap GAM di Aceh, ternyata penyelesaian dengan cara operasi militer tidak efektif bahkan menimbulkan masalah baru yaitu tuduhan masyarakat internasional tentang pelanggaran HAM. Pemerintah bisa belajar dari kasus Aceh. Separatisme terbukti tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi milite yang sudah terbukti tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Harus juga ada penyelesaian yang berdimensi sosial-ekonomi-kultural, yang memperbaiki kehidupan lokal. Pengibaran bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di depan mata Presiden SBY menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil memanager keberagaman adanya perhatian yang diberikan.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meredam aksi separatis ini antara lain : *Pertama*, adanya kesadaran dari pihak pengelola negara yang tak hanya sadar bahwa sejatinya bangsa ini memang berbeda, di sini menekankan pengakuan akan keberadaan yang satu dengan yang lainnya. Penyadaran keberagaman adalah kunci yang sesuai untuk menghandle keberbedaan di Indonesia. Ketika penyadaran ini sudah dilakukan maka terserah keberagaman itu mau diarahkan ke mana. Konsep multikulturismenya atau menjadikan bangsa ini sebagai sebuah negara federasi atau serikat misalnya. Konsep multikultur menekankan bahwa semua budaya-budaya yang ada harus diakui sebagai budaya bangsa dengan hak dan kewajiban yang sama, namun independensi diri dalam budaya-budaya itu tetap ada dengan tetap membuka ruang bagi pembentukan budaya baru yang diakui bersama.¹⁵ Dengan melihat bahwa multikultur dapat dijadikan jembatan bagi konsep pembentukan budaya baru, yang baru bisa membentuk dirinya dalam waktu yang lama. Jadi konsep pertama dapat dikatakan sebagai awal dimulainya upaya pembentukan budaya baru Indonesia. Bangsa ini belum selesai membentuk dirinya, bangsa ini masih berproses, dan mungkin akan terus berproses mencari bentuknya yang paling ideal.

Kedua, mestinya otonomi daerah mampu menjawab masalah-masalah daerah dengan mengedepankan kearifan lokal dan sekaligus dapat memadamkan nafsu sentrifugal. Dalam perspektif ini, mestinya anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap hidup dan mangkal di daerah pemilihannya, sehingga juga menjadi perekat dan dinamisator NKRI di tingkat konstituennya.

Ketiga, Sikap pemerintah dan presiden dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut RMS bisa dilakukan dengan arif dan bijaksana. Seperti dalam peringatan HUT RMS setiap tanggal 25 April. Dialog masih perlu dilakukan demi kebaikan bersama, daripada penyelesaian dengan kekerasan. Karena biasanya akan menimbulkan dampak yang tidak baik dikemudian hari.

Keempat, Dialog dan diplomasi dengan Belanda. Pemerintah harus terus membuka dialog dengan pemerintah Belanda, untuk tidak membuka peluang bagi berkembangnya gerakan ini, khususnya di Belanda. Bagaimanapun gerakan ini ada di

¹⁵ Jacques Bertrand, 2002, *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*, Cambridge:Cambridge University Press, page 35

Indonesia dan peluang berkembangnya karena kedekatan elit politik di Maluku dengan Belanda.

F. KESIMPULAN

Kiprah dan aktivitas Republik Maluku Selatan (RMS) hampir tak pernah terdengar lagi gaungnya dan diperbincangkan di media massa nasional, namun tidak di Belanda, sebagai markas RMS. Kelompok RMS secara ideologi masih tetap hidup, namun secara gerakan tidaklah begitu besar gaungnya. Pemerintah Belanda secara resmi tak mengakui keberadaan dan aktivitas RMS, namun kegiatan-kegiatan mereka secara ideologi masih tetap berjalan.

Pemberitaan tentang gerakan dan aktivitas RMS di Indonesia muncul kembali ketika sekelompok pemuda, mengibarkan bendera RMS di depan Presiden SBY pada puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Kota Ambon yang dipusatkan di Lapangan Merdeka pada 29 Juni 2007 lalu. Beberapa pemuda saat itu menampilkan Tarian Perang (Cakalele) yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera RMS.

Hingga 2 tahun berlalu, berita tentang gerakan RMS muncul kembali. Kini kelompok RMS mengajukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui pengadilan Den Haag, Belanda tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap aktivis-aktivis RMS serta menyerukan kepada pengadilan untuk menangkap Presiden SBY jika berkunjung ke Belanda, karena secara langsung dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Maluku.

Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh kelompok RMS kepada pemerintah Indonesia melalui pengadilan di Den Haag, Belanda seperti yang dijelaskan di atas. Oleh pengadilan di Den Haag tersebut, 2 tuntutan tersebut telah ditolak dan pengadilan berkesimpulan bahwa, tidak akan ada penangkapan SBY jika berkunjung ke Belanda dan menolak tuntutan RMS kepada pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun hingga kini ada 2 lagi tuntutan RMS yang belum diputuskan oleh pengadilan di Den Haag, yaitu mengenai letak makam pencetus dan sekaligus pemimpin RMS yaitu Dr Christian Robert Steven Soumokil serta menuntut dilakukannya dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok RMS tentang penentuan nasib sendiri (self determination) di Maluku. Akibat beberapa tuntutan oleh kelompok RMS tersebut, Presiden SBY secara mendadak memutuskan menunda kunjungan resminya ke Belanda atas undangan Ratu Belanda serta Perdana Menteri Belanda.

Karena tokoh-tokoh RMS di Belanda seperti John Wattilete, Wim Sopacua serta yang lainnya akan tetap memperjuangkan kepentingan RMS khususnya di Belanda, maka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kelompok RMS tersebut adalah dengan terus melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda untuk tidak memberi kesempatan dan peluang kepada kelompok RMS untuk memperjuangkan tuntutannya.

DAFTAR PUSTAKA

Betrand, Jacques, *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*, Cambridge:Cambridge University Press, 2002

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1998.

Fortuna, Dewi Anwar dkk, *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Jones Wolter S, *Logika HI II*, Gramedia, Jakarta, 1992

Natsir Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia (Jakarta:1988)

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar , *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006

politik.kompasiana.com/2011/04/30/penyebab-perang, diakses Juli 2010

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2064647-faktor-faktor-pemicu-munculnya-separatisme/#ixzz1Lrp8B95f>, diakses juli 2010

"http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan", diakses Juli 2010

"[Asgub Diduga Terlibat Kasus RMS, Polisi Masih Selidiki](#)", [DetikCom](#), diakses Juli 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/ Dokumen](http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen) pemberontakan RMS di Maluku, diakses Juni 2010

Harian *Haagsche Courant* (16/12/98)

Suara Merdeka, 14 Mei 2002.